

## Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh

**Puti Andiny**

*Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Langsa Aceh  
Email: putiandiny@unsam.ac.id*

**Pipit Mandasari**

*Fakultas Ekonomi Universitas Samudra  
Email: pipitmandasari@gmail.com*

### Abstrak

*Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data Produk Regional Domestik Bruto (PDRB), kemiskinan dan ketimpangan pembangunan Provinsi Aceh tahun 2006-2015. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda, hal ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh, dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  untuk variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) adalah  $0,077 < 0,723$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh. Kemudian hasil penelitian menunjukkan nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  untuk variabel  $X_2$  Kemiskinan adalah  $-0,107 > -0,829$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima yang artinya variabel  $X_2$  (kemiskinan) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  adalah  $0,073 < 0,930$ . Berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima, yang artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. Nilai  $R^2$  sebesar 0,020 atau 2,0 persen. Hasil ini menunjukkan variabel Ketimpangan dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan sebesar 2,0 persen, selebihnya Ketimpangan dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 98 persen yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.*

**Kata kunci:** *Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Ketimpangan*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada

setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*under developed region*).

Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Disamping itu, hambatan-hambatan sosial dan budaya dalam proses pembangunan hampir tidak ada sama sekali.

Dalam kondisi yang demikian, setiap kesempatan peluang pembangunan dapat di manfaatkan secara lebih merata antar daerah. Akibatnya, proses pembangunan pada negara maju akan cenderung mengurangi ketimpangan antar wilayah. Mengingat konsep pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlanjur diyakini serta di terapkan secara luas, maka kita tidak boleh ketinggalan dan mau tidak mau harus berusaha mempelajari hakekat dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen (Sjafrizal, 2008).

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi Aceh Tahun 2011-2015**

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan 2010 (Milyar Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Kemiskinan (Ribuan Jiwa)	Perkembangan (%)	Ketimpangan	Perkembangan (%)
2011	104.874.211,2	-	894,8	-	0,1013	-
2012	108.914.897,6	3,85	909,04	1,59	0,3244	22
2013	111.755.826,6	2,61	842,42	-7,32	0,3257	4
2014	113.487.799,2	1,55	881,27	4,61	0,3097	-4,91
2015	112.672.440,9	-0,72	851,59	-3,36	0,3200	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Terlihat pada Tabel 1.1 kondisi perekonomian Provinsi Aceh cukup baik, di mana pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir selalu positif namun pada tahun ke lima pertumbuhan ekonomi negatif, kemudian pada tahun-tahun tertentu terjadi fluktuasi pada kemiskinan dan ketimpangan. Pada tahun 2011-2014 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,8 persen, 2,61 persen, 1,55 persen.

Kemudian pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi penurunan sebesar -0,72 persen, hal ini disebabkan karena menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun industri.

Terlihat pula pada Tabel 1.1 tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 yaitu sebesar 1,59 persen. Meningkatnya kemiskinan pada tahun 2012 ini disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran di beberapa Kabupaten kota seperti Aceh Tenggara, Bener Meriah dan Kota Langsa. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menyebabkan berkurangnya jumlah kemiskinan di daerah tersebut. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar -7,32 persen. Kemudian pada tahun 2014 tingkat kemiskinan kembali meningkat sebesar 4,61 persen, hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 20,5 persen. Pertumbuhan ekonomi 2014 hanya dirasakan oleh penduduk kota sehingga terjadi penurunan kemiskinan di perkotaan dan peningkatan kemiskinan yang tinggi di daerah pedesaan. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar -3,36 persen.

Pada Tabel 1.1 terlihat tingkat ketimpangan di Provinsi Aceh pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu sebesar 22 persen. Kemudian pada tahun 2013 tingkat ketimpangan meningkat sebesar 4 persen, hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota Provinsi Aceh. Pada tahun 2014 ketimpangan menurun sebesar -4,91 persen. Tahun 2015 tingkat ketimpangan kembali meningkat sebesar 3,32 persen, hal ini diakibatkan karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota di Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan beberapa daerah lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi, sedangkan Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata.

Berdasarkan Fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul

## judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh”.

### Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh secara parsial terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh
2. Apakah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh secara simultan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara simultan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh.

### Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara umum dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fundamental ekonomi makro, khususnya pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan fiskal di Provinsi Aceh.
2. Secara praktis menjadi masukan bagi pemerintah daerah Aceh dalam perumusan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan ekonomi
3. Secara teoritis, dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi.

## LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

### Ketimpangan

Pengertian dari ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah

dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar daerah dengan pusat dan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan dalam sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Sjafrizal, 2008).

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi. Dalam ketimpangan ada ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah secara absolut maupun ketimpangan relatif antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antar daerah. Filsafah pembangunan ekonomi yang dianut pemerintah jelas tidak bermaksud membatasi arus modal (bahkan yang terbang ke luar negeri saja hampir tidak dibatasi). Arus modal mempunyai logika sendiri untuk berakumulasi di lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, dan tingkat resiko yang lebih rendah. Sehingga tidak dapat dihindari jika arus modal lebih terkonsentrasi di daerah-daerah kaya sumber daya alam dan kota-kota besar yang sarana dan prasarannya lebih lengkap yang mengakibatkan jumlah penduduk yang menganggur di Provinsi yang berkembang akan meningkat. Pendapatan per kapita rata-rata suatu daerah dapat disederhanakan menjadi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk. Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang didekati dengan pendekatan konsumsi (Sjafrizal, 2008).

### Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arsyad (2010) Pertumbuhan ekonomi yaitu kenaikan Gross Domestik Bruto (GDP) dan Gross National Bruto (GNP) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan terjadi perbaikan struktur ekonomi atau sistem kelembagaan. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan

untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Dari definisi diatas berarti terdapat tiga komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Kenaikan output secara berkesinambungan merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
3. Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dalam bidang teknologi harus disesuaikan dengan inovasi dalam bidang sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk.

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi**

#### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis yaitu pengembangan-pengembangan hak milik, spesialisasi, pembagian kerja merupakan faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis dan laju perkembangan perekonomian masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional menuju masyarakat kapitalis. Menurut Adam Smith proses pertumbuhan ekonomi dibedakan dalam dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2010).

#### **2. Teori Pertumbuhan Rostow**

Teori pertumbuhan ekonomi Rostow berdasarkan pengalamannya pembangunan membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahapan :

- a. Tahap ekonomi tradisional
- b. Tahap ekonomi pra tinggal landas
- c. Tahap tinggal landas
- d. Tahap menuju kedewasaan
- e. Tahap konsumsi masyarakat tinggi

#### **3. Teori Pertumbuhan Mahzab Keynesian**

Setiap perekonomian dapat menyisihkan sejumlah proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya untuk mengganti barang-barang modal. Menurut Harrod Domar, untuk dapat meningkatkan laju perekonomian diperlukan investasi sebagai tambahan stok modal (Arsyad, 2010).

#### **4. Teori Pertumbuhan Neo Klasik**

Model pertumbuhan Neo klasik berpegang pada skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja, modal, dan kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri (Todaro, 2006).

#### **5. Teori Pertumbuhan Endogen**

Model pertumbuhan ini menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang (Todaro,2006). Teori ini mencoba mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam sistem ekonomi itu sendiri. Faktor-faktor utama penyebab terjadinya perbedaan tingkat pendapatan perkapita antar negara adalah karena adanya perbedaan fiskal, modal insan, dan infrastruktur (Arsyad,2010).

### **Kemiskinan**

Pengertian mengenai arti dari kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia.

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan (Todaro, 2006).

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Yasa, 2008). Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai "ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum". Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Kuncoro, 2006). Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lahan bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai), BPS (2010).

Sen dalam (Todaro, 2006), berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah *income* semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif. Menurut Todaro dalam (Permana, 2012) melihat kemiskinan dari dua sisi yaitu :

#### 1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

#### 2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan**

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk atau daerah dan antar sektor. Akan tetapi pada kenyataannya pertumbuhan tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Ketimpangan antar daerah sering

kali menjadi masalah serius. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan yang cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Daerah-daerah tersebut tidak mengalami kemajuan yang sama disebabkan beberapa hal misalnya karena kurangnya sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan penanam modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, juga tenaga kerja terampil (Sjafrizal, 2009).

Disamping itu adanya ketimpangan retribusi pembagian pendapatan dan pemerintah pusat kepada daerah juga dapat menyebabkan perbedaan kemajuan (pertumbuhan ekonomi) antar daerah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah dengan arah yang negatif. Artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin meningkat kapasitas produksi sehingga output juga akan meningkatkan pendapatan perkapita dan selanjutnya ketimpangan pendapatan antar wilayah akan semakin mengecil. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui mekanisme pusat pertumbuhan dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat membawa pengaruh bagi daerah lain baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Jika pertumbuhan di suatu daerah menyebabkan perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (*positif*) karena terjadi proses penetesan ke bawah (*trickling down effect*). Sedangkan jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin jauh berarti terjadi imbas yang kurang baik (*negatif*) karena terjadi proses pengkutuban (*polarization effect*), Pangkiro (2016).

Menurut Sjafrizal (2009) ketimpangan pembangunan antar wilayah dipicu oleh beberapa hal antara lain perbedaan potensi daerah yang sangat besar, perbedaan kondisi demografi, ketenagakerjaan, dan perbedaan kondisi sosial budaya antar wilayah. Disamping itu kurang lancarnya mobilitas barang-barang dan orang antar daerah juga turut mendorong terjadinya ketimpangan pembangunan regional. Akibat

dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bila mana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*underved regional*). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah merupakan fungsi dari waktu.

Pada tahap awal pembangunan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar antar daerah telah mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar daerah. Namun dalam jangka panjang ketika faktor-faktor produksi di daerah semakin dioptimalkan dalam pembangunan maka perbedaan laju pertumbuhan output antar daerah akan cenderung menurun.

### **Pengaruh Kemiskinan Terhadap Ketimpangan**

Miller (Arsyad, 2006) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan layaknya satu unsur yang tak dapat dipisahkan. Kemiskinan ada diakibatkan karena adanya ketimpangan sosial dalam suatu Negara. Dimana sebagian besar pendapatan suatu negara hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang dan lainnya hanya mendapatkan porsi yang kecil atau malah tidak mendapatkannya. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan memiliki pengaruh yang negatif, yaitu di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat maka akan meningkatkan pula disparitas ekonomi yang akan terjadi. Ketimpangan sosial adalah masalah serius terutama di

daerah berkembang, karena ketimpangan pembangunan adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan konsentrasi ilmu Ekonomi Pembangunan yang mengkaji tentang ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yaitu berupa data PDRB, kemiskinan, dan ketimpangan pembangunan Provinsi Aceh tahun 2006-2015. Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan yang di mulai sejak Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak di publikasikan secara umum. Data penelitian ini berupa data PDRB, Kemiskinan dan Ketimpangan Provinsi Aceh yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2006-2015

### Ketimpangan Pembangunan

Ukuran ketimpangan pembangunan adalah untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan antar wilayah/daerah dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Williamson. Rumus Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y} \quad 0 < V_w < 1$$

Keterangan :

$V_w$  = Indeks Williamson

$y_i$  = Jumlah penduduk Kabupaten/ kota ke- $i$  (jiwa)

$y$  = Jumlah penduduk Provinsi Aceh (jiwa)

$f_i$  = PDRB per kapita Kabupaten/kota ke- $i$  (Rupiah)

$n$  = PDRB per kapita rata-rata Provinsi (Rupiah)

### Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan adalah modal regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2013) bahwa analisis regresi linier berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor di manipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linier berganda akan di lakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Inti persoalan dari analisis regresi adalah memperkirakan dan meramalkan nilai X apabila variabel X sudah diketahui nilainya. Hubungan variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pembangunan, untuk keperluan penelitian ini maka formulasi dimodifikasi sesuai dengan penelitian. Adapun formulasi regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

$Y$  = Ketimpangan

$X_1$  = Pertumbuhan Ekonomi

$X_2$  = Kemiskinan

$\beta$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$  = Koefisien regresi

$e$  = error

Dalam suatu analisis regresi berganda, untuk mengetahui tingkat signifikansi dari suatu koefisien regresi dapat dilakukan dengan uji t dan uji F.

### Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). Uji t dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

signifikan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas yang lain tidak berubah. Menurut Sugiyono (2013), menggunakan rumus :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

- T = Nilai uji t
- r = Koefisien korelasi pearson
- r<sup>2</sup> = Koefisien determinasi
- n = Jumlah sampel

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

- H<sub>0</sub> diterima jika nilai hitung statistik uji (*t<sub>hitung</sub>*) berada di daerah penerimaan
- H<sub>0</sub>, dimana *t<sub>hitung</sub>* < *t<sub>tabel</sub>* atau - *t<sub>hitung</sub>* > - *t<sub>tabel</sub>* atau nilai sig > *a*
- H<sub>0</sub> ditolak jika nilai hitung statistik uji (*t<sub>hitung</sub>*) berada di daerah penolakan
- H<sub>0</sub>, dimana *t<sub>hitung</sub>* > *t<sub>tabel</sub>* atau - *t<sub>hitung</sub>* < - *t<sub>tabel</sub>* atau nilai sig < *a*

### Uji F

Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter b (uji korelasi) dengan menggunakan uji F statistik. Untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (*simultan*) terhadap variabel terikat digunakan uji F. Menurut Sugiono (2013) di rumuskan sebagai berikut :

$$Fh = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan :

- R = Koefisien korelasi ganda
- K = Jumlah variable independen
- N = Jumlah anggota sampel

Distribusi F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan penyebut, yaitu k dan (n-k-1) untuk F kriteria yang dipakai adalah :

- H<sub>0</sub> diterima bila *F<sub>hitung</sub>* < *F<sub>tabel</sub>*, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- H<sub>0</sub> ditolak bila *F<sub>hitung</sub>* > *F<sub>tabel</sub>*, artinya variabel independen secara bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel terikat. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan menggunakan formula

$$R^2 = 1 - \frac{\sum ei^2}{\sum yi^2}$$

Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu (0 < R<sup>2</sup> < 1). Nilai R<sup>2</sup> yang kecil atau mendekati nol berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya nilai R<sup>2</sup> yang mendekati satu berarti variabel bebas memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

### Definisi Operasional

- a. Ketimpangan adalah suatu kondisi di mana suatu daerah mendapatkan transfer yang tidak sesuai dengan kebutuhan fiskalnya di bandingkan dengan daerah lain, atau adanya perbedaan pembangunan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, dalam satuan indeks.
- b. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi dilihat dari nilai laju pertumbuhan PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) di Provinsi Aceh tahun 2006-2015, dimana PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto*) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Provinsi Aceh, dalam satuan milyar rupiah.
- c. Kemiskinan adalah persentasi jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2006-2015, dinyatakan dalam satuan jiwa..

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Gambaran Umum Provinsi Aceh**

Provinsi Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat dengan batas wilayahnya : sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia, sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Aceh terletak di ujung Barat Laut Sumatera (2°00'00''-6°04'30'' Lintang Utara dan 94°58'34''-98°15'03'' Bujur Timur) dengan Ibu Kota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 56.758,85 km<sup>2</sup> atau 5.675.850 Ha (12,26 persen dari luas pulau sumatera), wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.479.802 Ha dengan garis pantai 2.666,27 km<sup>2</sup>. Secara administratif pada tahun 2009, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 276 kecamatan, 755 mukim dan 6.423 gampong atau desa.

**Ketimpangan Provinsi Aceh**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dalam pemerataan antar daerah maka dapat digunakan indikator pemerataan yaitu Indeks Williamson. Perbandingan indeks ini dari tahun ke tahun akan menunjukkan apakah ada perubahan atau tidak. Dimana nilai koefisien Indeks Williamson yaitu dari 0 sampai 1, jika nilai koefisien mendekati 0 maka tingkat ketimpangan yang terjadi semakin kecil dan jika nilai koefisien mendekati 1 berarti tingkat ketimpangannya semakin tinggi (RPJM Aceh, 2012).

**Tabel 1.2**

**Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Aceh Tahun 2006-2015**

Tahun	Ketimpangan (indeks)	Perkembangan
2006	0.3035	-

2007	0.2970	-2,14
2008	0.2073	-30,2
2009	0.3010	45,2
2010	0.1064	-64,6
2011	0.1013	-4,79
2012	0.3244	22
2013	0.3257	4
2014	0.3097	-4,91
2015	0.3200	3,32

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Terlihat pada Tabel 1.2 diatas bahwa perkembangan ketimpangan di Provinsi Aceh selama tahun 2006-2015 dari hasil indeks Williamson mengalami fluktuasi. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh hal ini terjadi karena tidak meratanya persebaran pertumbuhan ekonomi di beberapa Kabupaten kota Provinsi Aceh. Tingkat ketimpangan paling rendah terjadi pada tahun 2008 dan 2010 di mana ketimpangan yang terjadi hanya -30,2 persen, -64,6 persen. Sedangkan tingkat ketimpangan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 dan 2012 dengan masing-masing sebesar 45,2 persen dan 22 persen. Semakin tinggi tingkat ketimpangan yang terjadi maka akan memperburuk keadaan perekonomian suatu daerah.

**Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh**

Untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Aceh hal ini diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibanding dengan nilai tahun sebelumnya. Penggunaan atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang di ukur merupakan pertumbuhan rill ekonomi dan pula merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya kegiatan ekonomi dalam salah satu daerah.

Pertumbuhan dan perkembangan PDRB Provinsi Aceh dapat ditinjau dari beberapa indikator makro, yaitu antara lain dari nilai tambah yang dihasilkan struktur perekonomian daerah dan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh pada tahun 2006-2015 atas harga konstan tahun 2010 mengalami fluktuasi, hal ini dapat di lihat dalam Tabel 1.3.

Pada Tabel 1.3 terlihat kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2007, 2008, dan 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu sebesar -2,36 persen, -5,27 persen dan -5,58 persen. Hal ini di sebabkan karena menurunnya produksi migas yang juga berpengaruh terhadap industri pengolahan berbahan baku gas, penurunan ekonomi pada sektor-sektor utama ini di proyeksikan akan terus berlangsung seiring dengan menurunnya cadangan migas di pantai timur Aceh.

Pada tahun 2010-2014 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2,76 persen, 3,27 persen, 3,85 persen, 2,61 persen dan 1,55 persen. Namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi menurun sebesar -0,72 persen, hal ini di sebabkan karena menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun industri.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi**  
**Provinsi Aceh**  
**Tahun 2006-2015**

Tahun	Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 (Milyar Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
2006	113.160.151,1	-
2007	110.486.419,4	-2,36
2008	104.659.783,6	-5,27
2009	98.817.666,7	-5,58
2010	101.545.236,8	2,76
2011	104.874.211,2	3,27
2012	108.914.897,6	3,85
2013	111.755.826,6	2,61
2014	113.487.799,2	1,55
2015	112.672.440,9	-0,72

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

**Kemiskinan di Provinsi Aceh**

Adapun jumlah dan perkembangan kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut:

**Tabel 1.4**  
**Perkembangan Kemiskinan Provinsi Aceh**  
**Tahun 2006-2015 (Ribu Jiwa)**

Tahun	Kemiskinan (Ribu Jiwa)	Persentasi Penduduk Miskin (%)	Perkembangan (%)
2006	1.149,7	28,28	-
2007	1.083,5	26,65	-5,75
2008	959,7	23,53	-11,4
2009	892,87	21,80	-6,96
2010	861,85	20,98	-3,47
2011	894,8	19,57	3,82
2012	909,04	19,46	1,59
2013	842,42	17,60	-7,32
2014	881,27	18,05	4,61
2015	851,59	17,08	-3,36

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Pada Tabel 1.4 di atas terlihat selama tahun 2006-2015 pada tahun-tahun tertentu kemiskinan mengalami fluktuasi. Perkembangan kemiskinan yang paling tinggi di Provinsi Aceh terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,61 persen, sedangkan persentasi penduduk tertinggi pada tahun 2006 sebesar 28,28 persen. Pada tahun 2007-2010 tingkat kemiskinan mengalami penurunan masing-masing sebesar -5,75 persen, -11,4 persen, -6,96 persen, -3,47 persen. Jika dilihat dari persentasi jumlah penduduk miskin pada tahun 2007-2010 yaitu masing-masing, 26,65 persen, 23,53 persen, 21,8 persen, 20,98 persen. Terlihat jumlah persentasi penduduk miskin masih tergolong tinggi walaupun tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Selanjutnya pada tahun 2011-2012 perkembangan kemiskinan meningkat masing-masing sebesar 3,82 persen, dan 1,59 persen. Ketika perkembangan kemiskinan meningkat di tahun 2011-2012 jumlah persentasi penduduk miskin menurun dari tahun sebelumnya, masing-masing 19,57 persen, 19,46 persen.

Meningkatnya perkembangan kemiskinan pada tahun 2011-2012 hal ini disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran di beberapa Kabupaten kota Provinsi Aceh. Pada tahun 2013

perkembangan kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar -7,32 persen, kemudian perkembangan kemiskinan yang terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar -3,36 persen. Jumlah persentasi penduduk miskin tahun 2013-2015 kembali menurun dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 17,6 persen, 18,05 persen, dan 17,08 persen. Menurunnya perkembangan kemiskinan pada tahun 2013 Kemiskinan Provinsi Aceh masih jauh di atas rata-rata nasional.

Berdasarkan data BPS Provinsi Aceh pada September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Aceh mencapai 859 ribu orang (17,11 persen). Persentasi penduduk miskin perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,21 persen (dari 11,13 persen), sedangkan di daerah perdesaan kemiskinan mengalami peningkatan 0,12 persen (dari 19,44 persen menjadi 19,56 persen). Kondisi tingginya angka kemiskinan ini merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat aceh yang masih terjat dangan persoalan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan aliran dana APBA belasan triliun yang mengalir ke Provinsi Aceh tiap tahunnya, maka berlimpahnya anggaran masih belum berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Termasuk persoalan pengangguran yang merupakan salah satu penyebab kemiskinan.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara parsial terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh maka penelitian ini menggunakan Uji t statistik untuk menguji variabel tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Ketimpangan). Pengujian ini dilihat dari masing-masing t-statistik dari regresi dengan t tabel dalam menolak dan menerima hipotesis. Pengujian regresi linier berganda dilakukan dengan

menggunakan SPSS versi 24. Berdasarkan Tabel IV-5 dapat diperoleh persamaan dimana:  $Y = 0,350 + 0,077 X_1 - 0,107 X_2$

Persamaan regresi tersebut menjelaskan konstanta dengan nilai sebesar 0,350 hal ini menunjukkan jika variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan nilainya tetap (konstan) maka nilai ketimpangan adalah sebesar 0,350.

Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) nilainya adalah 0,077 hal ini menunjukkan jika variabel pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka nilai ketimpangan mengalami kenaikan sebesar 0,077.

Koefisien regresi variabel kemiskinan ( $X_2$ ) nilainya adalah -0,107 hal ini menunjukkan jika variabel kemiskinan mengalami kenaikan 1 persen, maka nilai ketimpangan mengalami kenaikan sebesar - 0,107.

**Tabel 1.5**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.350	.596		.588	.575
Pertumbuhan Ekonomi	.077	.209	.148	.369	.723
Kemiskinan	-.107	.476	-.090	-.224	.829
R = 0,143 Fhitung = 0,073 Sig = 0,930 R² = 0,020					

Sumber: Data diolah 2017

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan SPSS Statistik 24, diperoleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,077 < 0,723$ ) berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut maka  $H_0$  diterima, yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel dependen (ketimpangan). Jadi dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (ketimpangan) di Provinsi Aceh.

Kemudian hasil pengujian hipotesis untuk variabel  $X_2$  (kemiskinan) diperoleh  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  ( $-0,107 > -0,829$ ) berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima, yang artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel  $X_2$  (kemiskinan) terhadap variabel dependen (ketimpangan). Dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel  $X_2$  (kemiskinan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (ketimpangan) di Provinsi Aceh.

### Uji Signifikansi Simultan ( Uji F )

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  ( $0,073 < 0,930$ ). Sesuai dengan hasil tersebut maka  $H_0$  diterima, yang artinya variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) dan variabel  $X_2$  (kemiskinan) secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (ketimpangan) di Provinsi Aceh.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $R^2$  (R square) sebesar 0,020 atau 2,0 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentasi sumbangan pengaruh variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan) terhadap variabel dependen (ketimpangan) hanya sebesar 2,0 persen. Sedangkan selebihnya sebesar 98 persen di pengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak di masukkan ke dalam model penelitian ini, antara lain yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi, jumlah penduduk dan belanja modal, dan sebagainya.

### Pembahasan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan di Provinsi Aceh

Dari hasil pengujian hipotesis di peroleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,077 < 0,723$ ) berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  ditolak, yang artinya secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi variabel ketimpangan di Provinsi Aceh. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Aceh tergolong pada kelompok ketimpangan yang tinggi. Penyebab

kesenjangan ekonomi dan sosial di Provinsi Aceh antara lain masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi tersebut menghadapkan Provinsi Aceh pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

Hasil penelitian ini sama halnya dengan hasil penelitian Pangkiro (2016) yang berjudul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Sulawesi Utara”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum memberikan jawaban atas ketimpangan yang terjadi. pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat sumbangan pada sektor yang menyerap tenaga kerja sedikit. Sementara sektor dengan tenaga kerja yang banyak masih belum menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi.

Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian Sudarlan (2015) dengan penelitiannya yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia” hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan sebesar 0,1333. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau sekitar 20 persen golongan berpendapatan tinggi menguasai hampir 50 persen pertumbuhan. Kelompok ini menguasai faktor-faktor produksi penting seperti modal dan memiliki sumber daya manusia dengan produktivitas tinggi. Sehingga merekalah yang sebagian kecil kelompok masyarakat yang menikmati sebagian besar pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan semakin tinggi.

Dari kedua hasil penelitian tersebut terlihat ada perbedaan dimana dalam penelitian Pangkiro (2016) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Sulawesi Utara, namun hasil

penelitian Sudarlan (2015) menjelaskan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi variabel ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh lebih di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### **Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh**

Dari hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel kemiskinan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan nilai  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  ( $-0,107 > -0,829$ ) berdasarkan hasil tersebut maka  $H_0$  ditolak, yang artinya secara parsial variabel kemiskinan tidak mempengaruhi variabel ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh. Dimana ketika kemiskinan meningkat sebesar  $-0,107$  maka ketimpangan menurun sebesar  $-0,829$ , hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa meningkatnya kemiskinan tidak meningkatkan jumlah ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel kemiskinan tidak mempengaruhi variabel ketimpangan di Provinsi Aceh. Hal ini sama seperti penelitian Sudarlan (2015) yang berjudul “Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kemiskinan tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan, hal ini berarti bahwa meningkatnya atau menurunnya jumlah penduduk miskin tidak akan mempengaruhi tingkat ketimpangan.

Tetapi hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Zaman et al (2010) dengan melakukan penelitian di Pakistan dengan judul “Analisis empirik Pertumbuhan, Ketimpangan dan Kemiskinan di Pakistan”. Pendekatan Ko-Integrasi (1964-2006) dengan kesimpulan bahwa tekanan terhadap kemiskinan akan berdampak negatif ketimpangan, sementara tekanan terhadap

pertumbuhan akan berdampak negatif terhadap kemiskinan dan ketimpangan, respon tekanan dalam kemiskinan dan pertumbuhan akan memiliki efek negatif.

Dari kedua hasil penelitian tersebut terlihat ada perbedaan pendapat tentang pengaruh variabel kemiskinan terhadap variabel ketimpangan. Dimana dalam penelitian Sudarlan (2015) variabel kemiskinan tidak mempengaruhi variabel ketimpangan, namun dalam penelitian Zaman et al (2010) menjelaskan variabel kemiskinan mempengaruhi variabel ketimpangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kemiskinan tidak mempengaruhi variabel Ketimpangan di Provinsi Aceh, Ketimpangan di Provinsi Aceh lebih di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil regresi dalam penelitian di peroleh persamaan:  

$$Y = 0,350 + 0,077 X_1 - 0,107 X_2$$
 Persamaan regresi tersebut menjelaskan konstanta dengan nilai sebesar  $0,350$  hal ini menunjukkan jika variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan nilainya tetap (konstan) maka nilai ketimpangan adalah sebesar  $0,350$ . Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) nilainya adalah  $0,077$  hal ini menunjukkan jika variabel pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 persen, maka nilai ketimpangan mengalami kenaikan sebesar  $0,077$ . Koefisien regresi variabel kemiskinan ( $X_2$ ) nilainya adalah  $-0,107$  hal ini menunjukkan jika variabel kemiskinan mengalami kenaikan 1 persen, maka nilai ketimpangan mengalami kenaikan sebesar  $-0,107$ .
2. Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  untuk variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) adalah  $0,077 < 0,723$ . Berdasarkan hasil tersebut maka

Ho diterima yang artinya variabel  $X_1$  (pertumbuhan ekonomi) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel ketimpangan di Provinsi Aceh. Kemudian hasil penelitian menunjukkan nilai  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  untuk variabel  $X_2$  kemiskinan adalah  $-0,107 > -0,829$ . Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima yang artinya variabel  $X_2$  (kemiskinan) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel ketimpangan di Provinsi Aceh.

3. Nilai  $F_{hitung}$  adalah  $0,073 < 0,930$ . Berdasarkan hasil tersebut maka Ho diterima, yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara simultan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh.
4. Dari hasil penelitian di peroleh nilai  $R^2$  adalah 0,020 atau 2,0 persen. Hasil ini menunjukkan variabel ketimpangan dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan sebesar 2,0 persen. Sedangkan selebihnya sebesar 98 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

#### Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya belum menghasilkan kontribusinya terhadap perekonomian di Provinsi Aceh.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk melakukan penanggulangan pengurangan kemiskinan untuk mengatasi ketimpangan. Kemudian menggerakkan sektor-sektor perekonomian agar lebih banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh.

#### Referensi

Badan Pusat Statistik, 2010, **Teori Kemiskinan**, Jakarta.

- Badan Pusat Statistik, 2011, **Produk Domestik Regional Bruto**, Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, 2012, **Produk Dometik Regional Bruto**, Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, 2013, **Produk Domestik Regional Bruto**, Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, 2014, **Produk Domestik Regional Bruto**, Provinsi Aceh.
- Badan Pusat Statistik, 2015, **Produk Domestik Regional Bruto**, Povinsi Aceh, Badan Pusat Statistik, 2015, **Aceh Dalam Angka**, <http://aceh.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik, 2016, **Aceh Dalam Angka**, <http://aceh.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik, 2017, <http://aceh.bps.go.id>
- Ghozali, Imam, 2011, **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)**, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Henny, A.K., Pangkiro, 2016, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara”, **Jurnal Otonomi Pembangunan**. Vol 16 No.01.
- Lincoln, Arsyad, 2010, **Ekonomi Pembangunan**, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- IBM, 2015, **Aplikasi SPSS Statistik 24**
- Murjana, Yasa, I G. W. 2008, “Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Provinsi Bali”, **Jurnal Ekonomi dan Sosial Input**, Vol.2, No.2-2008.
- Mudrajat, Kuncoro, 2006, **Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan**, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mudrajat, Kuncoro, 2006, **Dimensi Kemiskinan Desa dan Perkotaan**: Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhuda, Rama, 2013, “Analisis Ketimpangan Pembangunan (study kasus di Provinsi Jawa Timur Tahun

- 2005-2011)", **Jurnal Administrasi Publik**. Vol.1, No.4:110-119.
- Permana, Yoga, Anggit, 2012, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009", **Jurnal Ekonomi**, Vol.1, No.1.
- Dokumen, 2012-2017, **RPJMA**, Provinsi Aceh
- Sjafrizal, 2008, **Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi**, Padang: Badouse Media.
- Sjafrizal, 2012, **Ekonomi Wilayah dan Perkotaan**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2013, **Statistik untuk Penelitian**, Bandung: Alfabeta.
- Sudarlan, 2015, "Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia". **Jurnal EKSIS**, Vol.11 No.1:3036-3212.
- Todaro, M.P, 2006, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P, dan Smith, S.C, 2006, **Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Edisi Kesembilan**, Jakarta: Erlangga.
- Zaman, Khalid, et al (2010). An Empirical Analysis of Growth, Inequality and Poverty Triangle in Pakistan. Cointegration Approach (1964-2006). **International Research Journal of Finance and Economics Euro Journal Publishing, Inc.**